KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kunker DPR ke Luar Negeri Disortir Sampai Pemilu 2014
Tanggal : Senin, 11 Februari 2013
Surat Kabar : Republika
Halaman : 11

Kunker DPR Ke Luar Negeri Disortir Sampai Pemilu 2014

Kunjungan Kerja DPR ke luar negeri sampai Pemilu 2014 harus disortir. Anggota tidak boleh lagi seenak-enaknya melakukan plesiran sampai akhir jabatan. Wakil rakyat lebih baik fokus kunker ke daerah pemilihan, daripada ke luar negeri.

BADAN Kehormatan (BK) DPR telah membuat rekomendasi khusus kepada pimpinan DPR untuk menyeleksi izin dan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan tahun 2103. "Kunker ke luar negeri harus menjadi perhatian semua unsur fraksi dan alat kelengkapan, pimpinan kita minta melakukan seleksi ketat," kata Ketua BK M Prakosa.

Prakosa mengatakan, BK menyoroti serius kunker ke luar negeri. Pasalnya, publik sudah memandang negatif kunker ini. Negatifnya kritikan public diakuinya, berkaitan dengan transparansi hasil kunker.

"Salah satu yang membuat DPR merosot adalah kunker ini. Kunker tidak mungkin dihilangkan, tetapi bisa dibatasi. Semua sudah sepakat dibatasi selektif. Tahun 2013 harus jadi momentum perbaikan DPR," janjinya.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, kunker ke luar negeri yang kerap dilakukan anggota dewan sudah semestinya di evaluasi demi efisiensi anggaran. Evaluasi harus dilakukan dari pembahasan anggaran sejak ditingkat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Menurut dia, tahun 2013 DPR tidak perlu lagi ke luar negeri. DPR sebaiknya diarahkan untuk lebih mengutamakan kepentingan menyerap aspirasi rakyat di daerah.

"Sisa waktu menjelang pemilu anggota DPR harus mengutamakan kunker ke dapil, bukan ke luar negeri. Lebih penting memang kunker ke konstituen," katanya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Tahun lalu akibatnya banyaknya acara kunker ke luar negeri, membuat agenda hasil kunker tersebut tidak bisa dikontrol dengan baik.

Hidayat menjanjikan, Fraksi PKS tidak akan melakukan kunker ke luar negeri sampai akhir tahun. Fraksi PKS, janji dia, akan bekerja untuk rakyat Indonesia di sisa masa jabatan DPR hingga 2014 nanti. "Fraksi PKS melarang anggota untuk ikut kunker ke luar negeri hingga masa tugas di DPR periode 2009-2014 berakhir," janjinya.

Bekas Ketua MPR ini mewajibkan anggota Fraksi PKS untuk melaksanakan amanat rakyat sampai selesai masa jabatannya. Hidayat menyatakan, kebijakan larangan anggota Fraksi PKS ke luar negeri telah diputuskan melalui Sidang Majelis Syuro. Majelis Syuro PKS, kata dia, ingin anggota DPR fokus melayani rakyat di sisa jabatannya. Mereka harus fokus menyerap dan melaporkan aspirasi rakyat.

> **Sisa waktu menjelang pemilu anggota DPR harus mengutamakan kunker ke dapil, bukan ke luar negeri. Lebih penting memang kunker ke konstituen.**

Pengamat politik Universitas Paramadina Ikhsan Tualeka mengatakan, anggota DPR periode 2009-2014 sangat produktif melakukan kunker keluar negeri. Namun, dari jumlah kunker yang produktif itu, hanya segelintir anggota DPR saja hanya menghasilkan laporan secara tertulis.

"Untuk periode ini hasil laporan tertulis yang dibuat anggota DPR saat kunker itu minim. Banyak anggota yang habis pulang dari luar negeri, lupa dan tidak melaporkan hasilnya," katanya.

Padahal, kata Ikhsan, dalam setiap kunker yang dilakukan aggota DPR harus terdapat kewajiban untuk membuat laporan. "Anggota DPR kita itu cukup malas, jarang membuat laporan secara tertulis tentang hasil kinerjanya di DPR kepada konstituen. Ini memprihatinkan," pungkasnya. ■ YAN